

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN  
LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (L2T2) DI  
PDAM TIRTANADI KOTA MEDAN**

**TUGAS AKHIR**

**Oleh:**

**SRI KARTIKA SARI LUBIS**  
**2103100055**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : Sri Kartika Sari Lubis  
NPM : 2103100055  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025  
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Ananda Mahardika S.Sos., M.SP..... (.....)  
PENGUJI II : Dr.Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si (.....)  
PENGUJI III : Dr.Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si..... (.....)

### PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.,Prof., Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP

Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

## BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

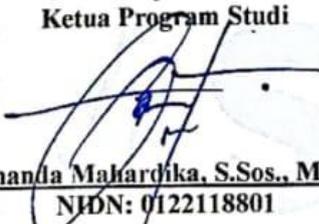
Nama Lengkap : Sri Kartika Sari Lubis  
NPM : 2103100055  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) Di PDAM Tirtanadi Kota Medan.

Medan, 19 April 2025

Pembimbing

  
Dr. Dedi Amriyah, S.Sos., M.Si  
NIDN: 0110097201

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

  
Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP  
NIDN: 0122118801

Dekan

  
Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP  
NIDN: 0030017402



## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Sri Kartika Sari Lubis**, NPM 2103100055, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

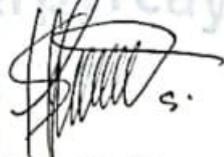
Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

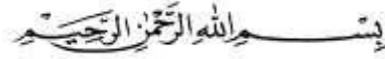
Medan, 10 Mei 2025

Yang Menyatakan,



  
**Sri Kartika Sari Lubis**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat dan rahmat yang telah diberikan oleh-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dan berjalan dengan baik. Shalawat serta beriringan salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita semua Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (L2T2) DI PDAM TIRTANADI KOTA MEDAN”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moral maupun secara materil. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang sangat istimewa dan yang paling tercinta dan utama kepada ayah dan mama penulis yaitu, Samsul Bahri Lubis dan Suryani yang telah merawat dan membesarkan serta membantu penulis dalam memberikan dukungan secara moral dan materil serta doa restu penulis sehingga penulis dapat mencapai cita-cita yang diharapkan. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivator terbesar agar penulis

mampu melangkah maju dan menjadi pribadi yang lebih baik. Serta penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc.Prof.Dr.Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra.Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr.Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr.Dedi Amrizal, S.Sos.,M.SI. selaku dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan arahan, motivasi, dan waktu kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Para pegawai dan staff Kantor Cabang Pemasaran Air Limbah PDAM Tirtanadi terutama Ibu Ummi Kholila selaku Kepala Bagian Pemasaran Air Limbah PDAM Tirtanadi, Mba Putri Ayunda selaku pegawai bagian Hub-Lang, Bapak Robi Sinurat selaku Asisten Umum yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis selama penelitian.
10. Kepada abang dan kakak penulis Juliandi Lubis dan Ns.Sri Nurmayana Lubis A.Md.Kep. S.Kep, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman terdekat dan seperjuangan penulis Delvire Rischa Landriva, Putri Wilandy, Andini Putri Dinanti Siregar, Dhea Putri Syahilla, Irva Rizky Tihani Putri, Wilda Handayani, Fauziah Mar'atu.
12. Terkhusus kepada Salsabila Andry Zarkasi yang selalu ada menemani dan berjuang bersama dengan penulis dalam menjalankan perkuliahan sampai dengan saat menulis tugas akhir, jika tidak denganmu maka tidak dengan yang lain.
13. Kepada sepupu penulis Yunissa Aristi Anggraina, Sucitra Anggareksa S.M, Devy Anggriani S.S, yang telah membantu memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis agar tetap semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
14. Kepada buleak penulis yaitu Nur Ainun dan Ernawati yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.
15. Kepada Asiatun Rodhiah S.I.Kom, yang sudah memberikan motivasi, dukungan serta cinta yang sangat besar kepada penulis selaku adik tingkat dalam menyelesaikan perkuliahan.

16. Kepada teman-teman SMK Putri Sitorus S.A.P, Bripda Vivie Meuthia Agustine S.H, Diana Elfrida Marpaung S.ST, Putri Riani S.S, Nora Sanita Sembiring S.Psi, Ridho Pulungan S.Kom, Rizky Franto Sholin S.T, Yudha Andhika Rahman S.Kom yang selalu memberikan dukungan serta menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi.
17. Kepada keponakan tercinta Haykal Khalil Aditama, Raisya Lubis, Habib Lubis, Mikhayla Azhkiara Aditama yang selalu menjadi penghibur penulis selama perkuliahan sampai dengan menulis tugas akhir.
18. *I wanna say thank you for Wasil Khan because he has given the best support and always beside me during my course until it is finished.*
19. Kepada seluruh teman-teman prodi Ilmu Administrasi Publik Stambuk 21 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata kepada seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang juga memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik. Serta tidak lupa penulis memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama penulis duduk diperkuliahan sampai akhir menyelesaikan skripsi ini, karena sesungguhnya penulis juga manusia dan tidak luput dari kesalahan, penulis akan mencoba lebih baik lagi kedepannya.

***Wassalamua'alaikum Wr.Wb***

Medan, 04 April 2025

Sri Kartika Sari Lubis

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (L2T2) DI PDAM TIRTANADI KOTA MEDAN**

**OLEH:**

**SRI KARTIKA SARI LUBIS**

**2103100055**

Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) di Kota Medan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan. Melalui sistem pengelolaan lumpur tinja yang terstruktur dan terjadwal, program ini mampu mencegah pencemaran air tanah dan permukaan serta mengurangi risiko penyebaran penyakit akibat sanitasi yang buruk. Keberhasilan program turut berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan limbah domestik yang lebih teratur dan efisien. Studi kasus pada PDAM Tirtanadi menunjukkan bahwa perbaikan dilakukan melalui pembentukan struktur organisasi pendukung program L2T2, penyusunan peraturan internal, dan pelaksanaan penyedotan lumpur tinja secara sistematis berdasarkan data pelanggan. Koordinasi lintas instansi, seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Lingkungan Hidup, juga berperan penting dalam memastikan perencanaan, penyediaan infrastruktur, serta pemantauan dampak lingkungan berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap instansi pelaksana seperti PDAM Tirtanadi, serta data sekunder dari dokumen resmi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini memberikan dampak positif yang signifikan, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sarana pengangkutan dan kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan jangka panjang program L2T2 sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, serta upaya berkelanjutan dalam peningkatan infrastruktur dan edukasi publik.

**Kata kunci:** *layanan lumpur tinja terjadwal, sanitasi, kesehatan lingkungan, PDAM Tirtanadi, Kota Medan*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II</b> .....	10
<b>URAIAN TEORITIS</b> .....	10
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Implementasi .....	10
2.1.2 Kebijakan Publik .....	11
2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik .....	13
2.1.4 Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn.....	15
2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik....	16
<b>BAB III</b> .....	19
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	19
3.1 Jenis Penelitian .....	19
3.2 Kerangka Konsep .....	20
3.3 Definisi Konsep .....	22
3.4 Kategorisasi Penelitian .....	23
3.5 <i>Key Informan</i> .....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.7 Teknik Analisis Data .....	25
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian .....	26

3.9.1 Sejarah Singkat PDAM Tirtanadi.....	26
3.9.2 Visi PDAM Tirtanadi .....	27
3.9.3 Misi PDAM Tirtanadi .....	27
<b>BAB IV .....</b>	<b>29</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	29
4.1.1 Deskripsi <i>Key Infroman</i> .....	29
4.2 Deskripsi Haail Wawancara Berdasarkan Kategorisasi .....	30
4.2.1 Perbaikan Birokrasi Menuju yang Lebih Baik .....	30
4.2.2 Sistem Jaringan Kerja yang Jelas .....	35
4.2.3 Perwujudan Tujuan untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat....	39
4.2.4 Mandat Penyelesaian Kebijakan.....	43
4.3 Pembahasan .....	48
4.3.1 Perbaikan Birokrasi Menuju yang Lebih Baik .....	48
4.3.2 Sistem Jaringan Kerja yang Jelas .....	49
4.3.3 Perwujudan Tujuan untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat .....	49
4.3.4 Mandat Penyelesaian Kebijakan .....	50
<b>BAB V.....</b>	<b>50</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
5.1 Simpulan.....	50
5.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Lembar Pengesahan
Lampiran II	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran III	: Surat Pernyataan
Lampiran IV	: Dokumentasi Penelitian
Lampiran V	: SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran VI	: SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi
Lampiran VII	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VIII	: SK-4 Undangan Semonar Proposal
Lampiran IX	: Permohonan Perubahan Judul Skripsi
Lampiran X	: Pedoman Wawancara
Lampiran XI	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran XII	: Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran XIII	: SK-5 Berita Acaraa Bimbingan Skripsi
Lampiran XIV	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran XV	: Surat LoA KESKAP
Lampiran XVI	: SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep .....	21
Gambar 3. 2 Lokasi PDAM Tirtanadi kota Medan .....	26
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi .....	28

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Identitas Informan .....	31
------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia terdiri dari beberapa kota-kota besar yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Dari tingkat kepadatan penduduk yang tinggi ini menimbulkan beberapa permasalahan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Dalam Undang-undang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 salah satu prioritas pemerintah Indonesia adalah penyediaan sarana dan prasarana air limbah untuk mencapai target pencapaian universal akses sanitasi pada tahun 2019. Sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah untuk menunjang pencapaian tersebut adalah Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) setempat, yang merupakan sistem pengelolaan dimulai dari pewadahan tinja pada fasilitas seperti tangki septik dan cubluk. Selanjutnya, lumpur tinja disedot dan diangkut untuk diproses lebih lanjut di Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT). Berdasarkan jumlah penduduk dan akumulasi lumpur tinja yang dihasilkan setiap orang per tahun, maka potensi timbul lumpur tinja yang seharusnya terolah di IPLT cukup tinggi. Untuk mengoptimalkan sistem pengelolaan air limbah setempat dan menurunkan *idle capacity* Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja, maka dibuatlah mekanisme penyedotan lumpur tinja secara reguler atau dengan kata lain program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2).

Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya yaitu dalam pengelolaan sanitasi

lingkungan. Pengelolaan lumpur tinja yang dihasilkan dari septik tank dan saluran pembuangan limbah domestik ini menjadi salah satu isu penting yang saat ini tengah di upayakan pemerintah kota medan untuk bisa mengelolanya dengan baik. Akan tetapi bukan hanya dalam pengelolaannya saja, konstruksi bangunan penampung lumpur tinja yang tidak mengikuti standar teknis nasional juga menjadi salah satu masalah yang dialami oleh pemerintah kota medan saat ini. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja menjadi terhambat karena akses yang kurang memadai.

Dalam upaya menangani masalah pengelolaan lumpur tinja serta meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat, pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2019. Peraturan tersebut ditetapkan sebagai langkah awal yang baik untuk mengatur pengelolaan lumpur tinja secara terjadwal dan terencana. PDAM Tirtanadi sebagai pelaksana peraturan walikota ini. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat mengurangi masalah pengelolaan lumpur tinja di Kota Medan secara lebih efektif dan efisien.

Kebijakan Peraturan Walikota Medan (PERWAL) No.29 Tahun 2019 membahas tentang program yang dinamakan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal atau biasa di singkat dengan (L2T2). Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) merupakan layanan penyedotan lumpur tinja yang ditujukan kepada masyarakat yang menggunakan septik tank sebagai sistem pembuangan limbah tinja. Layanan ini menjadi salah satu yang diwajibkan pemerintah setempat seperti pemerintah kota dalam mengatasi permasalahan pembuangan limbah tinja ilegal dan

pencemaran ekosistem air tanah yang menjadi salah satu permasalahan di masyarakat. Layanan ini memiliki periode penyedotan (*Desludging period*) yang terjadwal dengan periode penyedotan pada umumnya dilakukan 3 tahun sekali, tetapi pelanggan mungkin memiliki periode penyedotan yang berbeda dan ditentukan sesuai dengan klasifikasinya (Lubis & Mahardika, 2024).

Kebijakan Peraturan Walikota Medan NO.29 Tahun 2019 tentang pengelolaan layanan lumpur tinja terjadwal oleh PDAM Tirtanadi Kota Medan merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Adapun tujuan dari program L2T2 yaitu :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja yang lebih efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan kesehatan masyarakat
- c. Menjaga kualitas air tanah dan air permukaan
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lumpur tinja
- e. Menjadikan pengelolaan lumpur tinja sebagai sumber daya.

Pada Peraturan Walikota Medan No.29 Tahun 2019 terdapat langkah-langkah dalam menjalankan program L2T2 yaitu dengan memperhatikan konstruksi bangunan lumpur tinja yang harus sesuai dengan standar teknis yang diakui secara nasional. Selain itu bangunan penampungan lumpur tinja harus memudahkan akses pengoperasian penyedotan limbah tinja. Selanjutnya masyarakat harus

melakukan pendaftaran dan menjadi pelanggan dari program L2T2. Setelah itu menunggu jadwal penyedotan yang akan dilakukan oleh PDAM Tirtanadi.

Dalam jurnal yang diterbitkan (IUWASH) (Indonesia Urban Water,2020) Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) disediakan untuk masyarakat sebagai solusi dari pembuangan limbah tinja pada septik tank yang sudah penuh. Dengan pelaksanaan dan penyedotan yang sesuai standar operasional yang berlaku serta diawasi secara ketat oleh lembaga terkait yang ditunjuk langsung oleh pemerintah kota medan yang memiliki infrastruktur yang mendukung dalam pengelolaan lumpur tinja, yang terdiri dari :

- a. Pengendalian septik tank
- b. Penyedotan septik tank
- c. Transpotasi lumpur tinja
- d. Pengelolaan lumpur tinja dalam melaksanakan program tersebut.

Kehadiran program ini diharapkan dapat mengatasi salah satu permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan penampungan, pengangkutan, dan pengelolaan lumpur tinja. Pelaksanaan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2), baik diminta maupun tidak, akan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh lembaga terkait, dengan tahapan-tahapan yang telah diatur secara sistematis.

Dalam survei awal, diketahui bahwa dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa permasalahan, yaitu pertumbuhan masyarakat dan penambahan bangunan yang membuat program ini kurang efektif dan efisien. Kepadatan

penduduk di suatu kota tidak dapat dihindari, sehingga timbul permasalahan-permasalahan kompleks yang perlu ditangani dengan cepat, salah satunya terkait penerapan sanitasi, khususnya pengelolaan limbah tinja. Dengan situasi tersebut pemerintah kota-kota besar di Indonesia mulai mencari solusi untuk menangani permasalahan ini sebagai salah satu upaya mengurangi dampak negatif dari minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola limbah tinja yang dihasilkan.

Selain itu banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa sedot tinja ilegal serta masyarakat yang saluran pembuangannya langsung mengalir ke sungai menjadikan pengimplementasian kebijakan ini semakin sulit untuk dijalankan. Selain itu ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian kebijakan ini, yaitu:

- a. Keterbatasan infrastruktur dalam pembangunan septiktank masyarakat kota medan yang tidak sesuai dengan standart nasional serta akses yang sangat sulit dijangkau untuk dilakukan penyedotan secara berkala. Bahkan saat ini diketahui bahwa ada masyarakat yang tidak memiliki tangki pembuangan tinja yang pada akhirnya tinja dialirkan ke sungai. Ini menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat menimbulkan penyakit yang serius. Seharunya masyarakat memiliki tangki penampungan tinja sesuai standart nasional agar program ini dapat dijalankan lebih efektif dan efisien.
- b. Distribusi layanan yang belum dapat dilakukan secara merata karena kurangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap

pentingnya pengelolaan lumpur tinja secara terjadwal. Seharusnya PDAM Tirtanadi dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait program ini secara lebih merata kepada masyarakat kota medan.

- c. Serta kurangnya komunikasi antar lembaga terkait yang seharusnya dapat menjalankan program ini sebaik mungkin agar masyarakat dapat menikmati lingkungan yang lebih sehat dan bersih.

Berdasarkan beberapa masalah yang sudah dijabarkan diatas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan terkait layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2) pada saat ini oleh PDAM Tirtanadi kota medan yang diaplikasikan melalui penelitian ilmiah dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN LAYANANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (L2T2) DI PDAM TIRTANADI KOTA MEDAN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk dapat mempermudah dan memperjelas penelitian ini, maka permasalahan pokok yaitu: “Bagaimana PDAM Tirtanadi kota medan dalam Mengimplementasikan Peraturan Walikota Medan No.19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Lumpur Tinja Terjadwal di Kota Medan ?

## **1.3 Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang pengelolaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang dilakukan PDAM tirtanadi kota medan berdasarkan Perwal No.29 Tahun 2019 di wilayah kota medan sejak ditetapkannya perwal tentang pengelolaan layanan lumpur tinja sejak 2019.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat itu adalah:

a. Manfaat bagi Kepala Kantor PDAM Tirtanadi Kota Medan

Manfaat dari penelitian ini bagi PDAM Tirtanadi dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan lebih efektif untuk memastikan masyarakat dalam merasakan dampak positif dari program layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2).

b. Manfaat Masyarakat Kota Medan

Manfaat bagi masyarakat kota medan dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi perubahan pandangan masyarakat dalam pentingnya melakukan penyedotan limbah tinja secara berkala.

c. Manfaat bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan dalam pengelolaan limbah tinja di Kota Medan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

## **BAB I**

**Pendahuluan** : Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II**

**Uraian Teoritis** : Pada bab ini mengemukakan teori-teori yang melandasi penelitian, yang akan menguraikan tentang pengertian implementasi, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, tahap-tahap perumusan kebijakan publik, unsur-unsur implementasi kebijakan, dan implementasi kebijakan pengelolaan lumpur tinja.

## **BAB III**

**Metode Penelitian** : Pada bab ini berisikan jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan lokasi waktu penelitian.

**BAB IV****Hasil Penelitian****dan Pembahasan**

: Pada bab ini menjelaskan hasil dari data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang diteliti.

**BAB V****Penutup**

: Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil yang diteliti.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *implementation* yang berasal dari kata kerja (*to*) *implement*, yang artinya membuat apa yang sudah diputuskan secara resmi atau digunakan. Sesuatu hal yang sudah ditetapkan dan dituangkan dalam suatu kebijakan publik harus diimplementasikan. Implementasi ialah sesuatu aktivitas yang dibuat untuk mengedarkan suatu kebijakan yang dicoba oleh para implementor pada golongan selaku usaha untuk dapat menciptakan suatu kebijaksanaan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk mengaplikasikan berbagai macam aspek tanpa adanya batasan.

Menurut (Nurhayati., 2023) implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan, sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Dalam artian implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang matang berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. Menurut (Mamoto, 2018) implementasi adalah bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak dapat berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Menurut (Nur et al., 2024) implementasi adalah suatu proses membentuk suatu kaitan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan, biasanya

direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan tercapai, sehingga nantinya akan menghasilkan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan.

Dari beberapa pemaparan definisi diatas, penulis dapat mengartikan bahwa implementasi adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam menjalankan sebuah kegiatan terencana atau bahkan sebuah kebijakan secara sungguh-sungguh dengan berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu implementasi tidak dapat berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh objek selanjutnya.

### **2.1.2 Kebijakan Publik**

Menurut (Astuti & Zubaedah, 2023) kebijakan publik adalah suatu tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Menurut (Damanik et al., 2024) kebijakan publik sesuatu apapun yang sudah di pilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan yang di dalamnya mengatur perintah-perintah mengenai apa yang harus dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat.

Sedangkan menurut (Pasién & Studi, 2024) kebijakan publik sering kali dipahami sebagai keputusan-keputusan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, keuangan, dan sumberdaya manusia. Dilihat dari prosesnya bahwa kebijakan publik diartikan sebagai buah dari terciptanya sinergi kesepakatan bahkan antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem. Kebijakan pada dasarnya menitikberatkan pada “publik dan masalah-masalahnya”, didefinisikan serta bagaimana semua persoalan tersebut diletakkan dalam agenda kebijakan. Kebijakan membatasi ruang lingkup dengan menetapkan pedoman untuk pemikiran pengambilan keputusan dan menjamin bahwa keputusan yang diperlukan akan memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian tujuan yang menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan (Rizky & Mahardika, 2023).

Oleh karena itu kebijakan publik merupakan suatu instrumen untuk melakukan suatu tindakan dalam bidang tertentu seperti mengatur tentang fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain yang dianggap dapat membawa dampak positif. Menurut (Mendrofa et al., 2024)

kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Dari hasil pemaparan teori diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah salah satu cara pemerintah dalam menanggapi isu-isu atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan membuat kebijakan, pemerintah berharap sebuah kebijakan akan dapat menangani sebuah permasalahan yang sedang terjadi ditengah masyarakat. Kebijakan publik adalah kebijakan substantif, dengan demikian apabila tindakan pemerintah dalam menangani masalah substantif dan kebijakan prosedural berkaitan dengan bagaimana sesuatu akan diselesaikan atau siapa yang akan melakukan. Adanya beberapa hal yang dimuat dalam suatu kebijakan, yaitu mengidentifikasi tujuan yang hendak dicapai, taktik atau strategi untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dan penyedia berbagai input untuk memungkinkan merealisasikan pelaksanaan taktik atau strategi.

### **2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut (Sutmasa, 2021) implementasi kebijakan publik suatu tindak lanjut dari pembuatan kebijakan yang menjadi sekuen yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan, karena hanya implementasi maka tujuan dan hasil yang hendak diwujudkan (*output dan outcomes*) bisa terwujud. Sedangkan menurut (Henriyani, 2015) implementasi kebijakan publik merupakan tahapan dari rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Di mana fungsi

implementasi itu adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan dan sasaran kebijakan publik diwujudkan.

Menurut (M. Irfan, 2021) implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuasn yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Implementasi kebijakan publik tidak lain dapat mencapai tujuan atau konsep implementasi yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, sehingga apabila pembuat kebijakan tidak salah dalam membuat kebijakannya.

Menurut (Henriyani, 2015) implementasi kebijakan publik merupakan proses menjalankan, meyelenggarakan dan mengupayakan keputusan kebijakan dan alternatifnya yang telah diputuskan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. Tujuan dari implementasi kebijakan publik sendiri adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat di realisasikan. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Menurut (Kristian, 2023) implementasi kebijakan publik adalah proses pengubahan masukan manusia dan material, termasuk informasi, teknis, manusia, permintaan dan dukungan menjadi keluaran berupa barang dan jasa. Dalam

implementasi kebijakan publik atau istilah eksekusi berbagai keputusan dan tindakan eksekutif yang berupaya mengubah mandat yang telah ditetapkan menjadi kenyataan.

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tahap paling krusial dalam menentukan kebijakan sampai dengan tahap menghubungkan anatara perencanaan dan hasil yang ingin dicapai. Implementasi kebijakan publik dapat dikatakan sukses apabila melakukan perencanaan yang matang secara strategi, koordinasi yang efektif antar aktor terkait, sumber daya yang memadai, serta dilakukannya pemantauan yang bersifat berkelanjutan. Tanpa faktor-faktor ini, meskipun kebijakan yang diambil dinilai sudah baik, akan tetapi hasil yang diinginkan mungkin tidak akan tercapai.

#### **2.1.4 Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn**

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi dan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik (Van Horn, C. E., & Van Meter, D. S. 1977 : 104).

Model pelaksanaan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van meter dan Van hag mengharuskan adanya kesesuaian antara keputusan

politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan. Mereka juga menjelaskan bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan dalam tindakan merupakan konsep penting dalam proses implementasi. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik, agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan kondisi, ekonomi, politik, dan sosial.

### **2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut (Jumariah M, 2021) pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahap proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Ada 4 aspek yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dilakukan. Pengetahuan atas apa yang dikerjakan dapat berjalan bila komunikasi antar lembaga penyelenggara kebijakan dapat berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan dalam pengimplementasian harus di transmisikan (di komunikasikan) kepada bagian yang lebih tepat. Komunikasi adalah hal yang paling diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan kepada masyarakat; (2) Sumber daya Dalam pelaksanaan suatu kebijakan juga harus ditunjang dengan ketersediaan sumber daya (manusia, materi dan metoda). Bukan hanya itu dalam pelaksanaan kebijakan publik juga perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten. Tetapi jika para pelaksana

kekurangan sumber daya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan dengan efektif; (3) Disposisi atau sikap pelaksana. Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis . Apabila pelaksana kebijakan memiliki posisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien; (4) Kewenangan struktur birokrasi. Merupakan otoritas/legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi organisasi. Keempat aspek itu dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh kepada aspek lainnya.

Dari beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengimplementasian sebuah kebijakan terdapat fokus utama kepada komunikasi yang harus dijalankan secara baik dan cermat antara pelaksana kebijakan agar tidak menimbulkan miskomunikasi dalam pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat. Selain itu sumber daya yang memadai harus juga memadai sehingga kebijakan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Implementasi kebijakan

publik bukanlah proses yang linear atau sederhana. Keberhasilan implementasi bergantung pada banyak faktor yang saling berkaitan. Perencanaan yang matang, sumber daya yang memadai, kepemimpinan yang efektif, dukungan politik dan sosial, serta pemantauan yang dilakukan secara berkala adalah elemen-elemen penting yang harus diperhatikan untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Hasibuan et al., 2022) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel dan sumber data dilakukan secara *puposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut (Al et al., 2022) teknik penelitian kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan meninjau semua data yang tersedia dari berbagai sumber yang dikumpulkan, mempelajari data, menunjanya, menyusunnya dalam satuan-satuan kemudian mengkategorisasikannya pada langkah berikutnya, dan memeriksa validitasnya data dan menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalarnya peneliti untuk membuat kesimpulan.

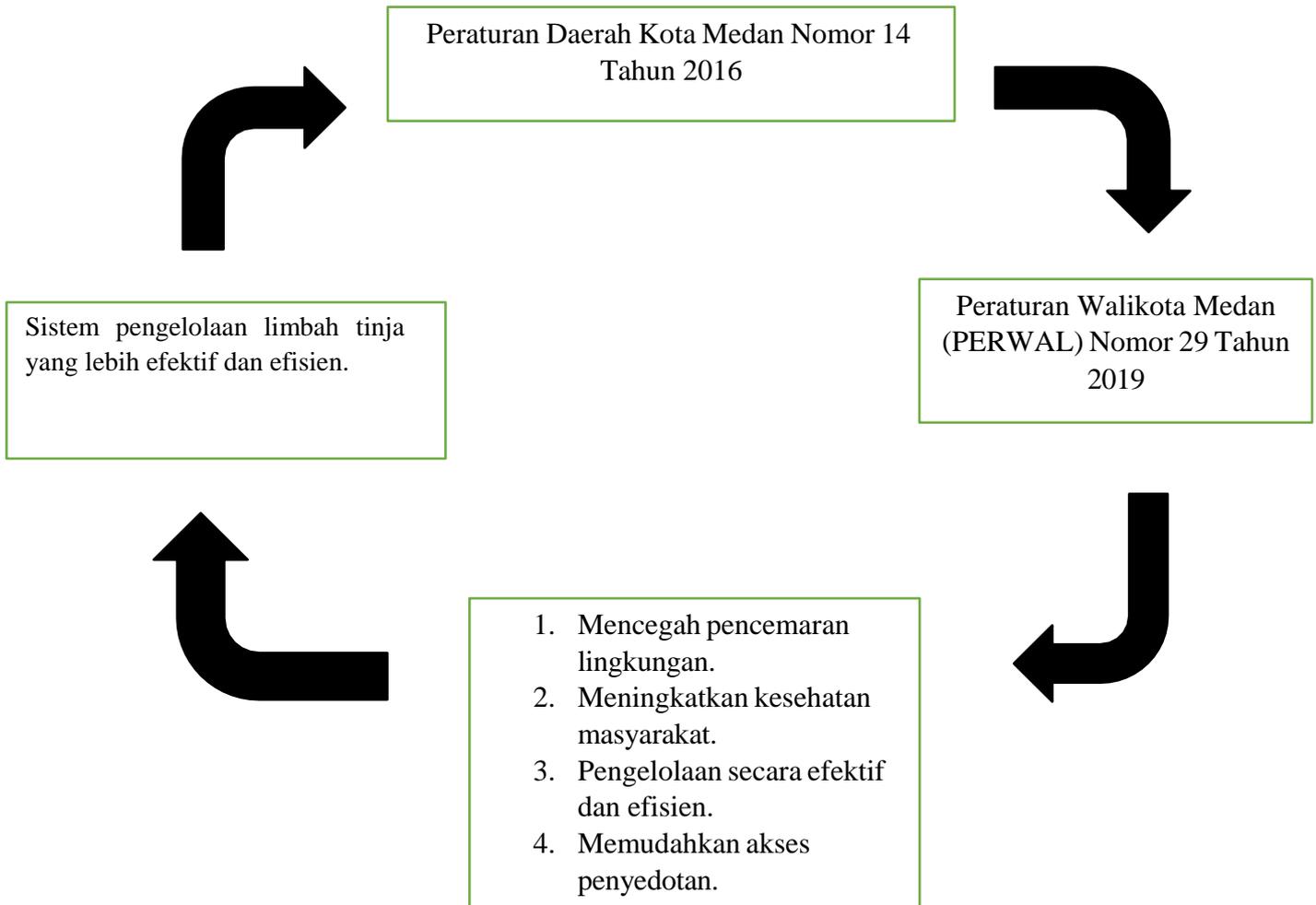
Pada intinya penelitian kualitatif adalah penelitian yang perlu dilakukan seusai suatu masalah diteliti secara kuantitatif, tetapi belum terungkapkannya penyelesaiannya. Dapat dikatakan, jika kita belum puas dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai suatu permasalahan, padahal kita tidak bisa menduga atau membuat asumsi-asumsi, maka penelitian kualitatif sangat penting untuk

dilakukan. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi ilmiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus berbekal wawasan yang luas agar dapat bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksikan objek yang diteliti menjadi lebih jelas.

### **3.2 Kerangka Konsep**

Peraturan Walikota Medan No.29 Tahun 2019 tentang program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) mengacu kepada sistem atau pendekatan yang dirancang untuk pengelolaan dan penanganan lumpur tinja secara terjadwal, terstruktur, dan berkelanjutan. Sistem ini bertujuan untuk mengatasi masalah pembuangan dan pengelolaan lumpur tinja yang sering kali menjadi tantangan dalam pengelolaan sanitasi, terutama di daerah perkotaan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi serta sistem pengelolaan tinja yang kurang memadai.

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep



### 3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan suatu gambaran atau rancangan yang telah di pikirkan secara matang-matang. Rancangan tersebut dibuat sebagai perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti agar segala kegiatan dapat berjalan dengan sistematis dan lancar.

Dari definisi konsep tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep berikut:

a. Implementasi

Merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam menjalankan sebuah kegiatan terencana atau bahkan sebuah kebijakan secara sungguh-sungguh dengan berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu implementasi tidak dapat berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh objek selanjutnya.

b. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah salah satu cara pemerintah dalam menanggapi isu-isu atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan membuat kebijakan, pemerintah berharap sebuah kebijakan akan dapat menangani sebuah permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat.

c. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan paling krusial dalam menentukan sebuah kebijakan sampai dengan tahap menghubungkan antara perencanaan yang matang secara strategi, koordinasi yang efektif antar aktor

terkait, sumber daya yang memadai, serta dilakukannya pemantauan yang bersifat berkelanjutan.

### **3.4 Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi adalah suatu proses pengelompokkan dari sebuah objek, ide dan konsep kedalam kategori-kategori tertentu berdasarkan kesamaan atau bahkan perbedaan yang dimiliki. Kategorisasi juga menjadi alat ukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisis variabel tersebut. Berikut kategorisasi dari variabel penelitian ini adalah:

1. Adanya perbaikan birokrasi menuju yang lebih baik.
2. Adanya sistem jaringan kerja yang jelas.
3. Adanya perwujudan tujuan untuk meningkatnya kesehatan masyarakat.
4. Adanya mandat yang diberikan untuk menyelesaikan suatu kebijakan.

### **3.5 Key Informan**

Penelitian informan dalam penelitian ini adalah sekelompok orang atau individu yang benar-benar mengetahui dan menjalankan tentang tema penelitian yaitu Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) di PDAM Tirtanadi Kota Medan. Dalam penelitian ini menggunakan subjek penelitian :

#### **1. Kepala Bagian Pemasaran Air Limbah PDAM Tirtanadi**

Nama : Ummi Kholila

Jabatan : Kepala Bagian Pemasaran Air Limbah PDAM Tirtanadi Cabang  
Pemasaran Air Limbah Kota Medan

Pendidikan : S1

## **2. Pegawai Hub-lang**

Nama : Putri Ayunda

Jabatan : Pegawai Hub-Lang

Pendidikan : S1

## **3. Asisten Umum**

Nama : Robianta Sinurat

Jabatan : Asisten Umum

Pendidikan : S1

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data , yaitu:

#### **1. Pengumpulan Data Primer**

Proses pengumpulan data yang dilakukan langsung dari sumber asli atau objek yang diteliti tanpa perantara atau orang ketiga. Biasanya data yang dihasilkan akan lebih valid dan relevan dengan tujuan penelitian karena diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung dari individu, kelompok atau objek yang bersangkutan.

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) ke dinas pelaksana kebijakan yaitu kantor PDAM Tirtanadi. Hasil wawancara merupakan data primer yang merupakan data yang diambil langsung tanpa perantara dari sumbernya.

## 2. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder penelitian juga mencakup penanganan dalam prose pelaksanaan program L2T2. Dari pemerintah kota sampai dengan dinas pelaksana yaitu PDAM Tirtanadi. Selain itu, data sekunder didapat dari hasil studi pustaka dalam bentuk hasil penelitian sebelumnya, berita-berita di media massa dan literatur terkait.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang sistematis menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menguraikan dalam satuan, mensitesiskannya, menyusun modelnya, memilih mana yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah untuk mereka sendiri dan orang lain untuk memahami.

1. Pengumpulan data, dapat diartikan untuk mengumpulkan informasi yang akurat, lengkap, dan relevan agar dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dan mendukung sebuah penelitian.
2. Penyajian data, penyusunan serta penyajian informasi dalam format yang mudah untuk dipahami dengan tujuan untuk membuat data yang lebih jelas, terstruktur, dan dapat diinterpretasikan secara efektif sehingga pengguna dan audiensi dapat menarik kesimpulan yang bermanfaat dari data yang sudah disajikan.
3. Penarikan simpulan, suatu proses menarik sebuah keputusan atau pemahaman dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan tujuan

untuk memberikan arah yang jelas dalam pembuatan keputusan, kebijakan, atau rekomendasi berdasarkan informasi yang sudah diperoleh.

### 3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan dilakukannya penelitian dalam mencari dan mengumpulkan data yang akan dibutuhkan saat melakukan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di kantor PDAM Tirtanadi Kota Medan yang beralamat di Jalan Sisingamaraja No.1, pasar Baru, kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian 12 november – 27 maret 2025.

Gambar 3. 2 Lokasi PDAM Tirtanadi kota Medan



Sumber:

<https://www.bing.com/maps?q=lokasi+kantor+pusat+PDAM+tirtanadi+kota+medan>

### 3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

#### 3.9.1 Sejarah Singkat PDAM Tirtanadi

PDAM Tirtanadi dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda dibawah penanggung jawab Direktur Deli Maatchappij Hendrik Cornelius Van Den

Honert, Direktur Deli Steenkolen Maatschappij Pieter Kolff dan Direktur Deli Spoorweg Maatschappij Charles Marie Hernkenath pada tanggal 8 september 1905 yang awalnya bernama NV Waterleiding, Maatschappij Ajer Beresih dengan kantor pusatnya berada di Amsterdam, Belanda.

Pada tanggal 10 september 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No.10 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi yang menyatakan bahwa tujuan pokok PDAM Tirtanadi adalah untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk membantu mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

### **3.9.2 Visi PDAM Tirtanadi**

**Visi :**

PDAM Tirtanadi menjadi perusahaan pengelola air minum dan air limbah yang terdepan di Indonesia, sehat dan memberikan pelayanan prima kepada pelanggan.

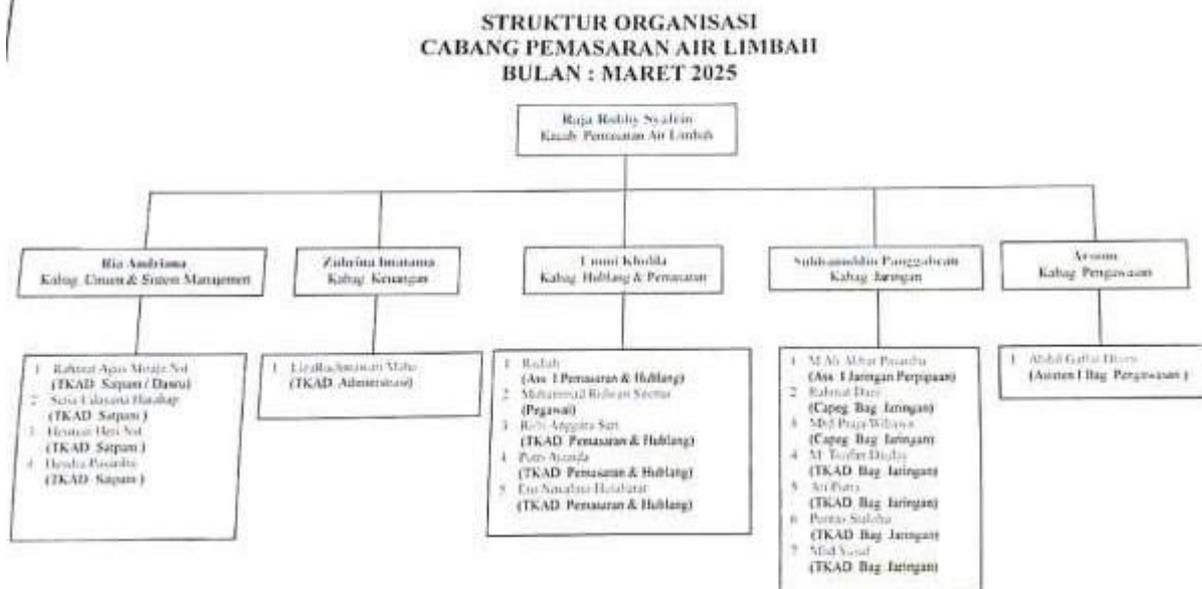
### **3.9.3 Misi PDAM Tirtanadi**

**Misi :**

1. Memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat yang memenuhi azas kualitas, kuantitas dan kontinuitas serta keterjangkauan masyarakat dengan menerapkan Good Corporate Governance yang didukung oleh SDM yang berintegritas, berkemampuan, dan profesional.

2. Menunjang peningkatan kualitas lingkungan dengan mengembangkan pelayanan air limbah.
3. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan dan pendapatan asli daerah dan membantu mengembangkan daerah.

Gambar 3. 3 Struktur Organisasi



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini penulis akan membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan. Metode penelitian yang digunakan selama proses pengumpulan data adalah dengan bentuk observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian yang sedang berlangsung berdasarkan fakta-fakta yang terlihat di lapangan. Data yang diperoleh melalui penelitian ini diambil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Implementasi Perwal Kota Medan No 29 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) di PDAM Tirtanadi Kota Medan dan kemudian akan dianalisis untuk menarik kesimpulan yang sebagaimana adanya.

Penelitian ini dilaksanakan pada 04 Maret 2025 sampai 27 Maret 2025 di Kantor Cabang Pemasaran Air Limbah PDAM Tirtanadi Kota Medan. Observasi dan wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban-jawaban dari masalah yang diteliti dan memperoleh data-data lain sebagai pendukung dalam penelitian ini.

##### **4.1.1 Deskripsi *Key Informan***

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berdasarkan wawancara key informan guna memperoleh informasi yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun key informan beserta jabatannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Identitas Informan

NO.	NAMA	JABATAN
1	Ummi Kholilah	Kepala Bagian Pemasaran Air Limbah
2	Putri Ayunda	Pegawai Hub-Lang
3	Robianta Sinurat	Asisten Umum

Wawancara merupakan percakapan antara dua individu atau lebih yang berlangsung antara pewawancara dengan key informan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Wawancara ini dilakukan dengan sistematis dan terarah, yaitu penulis telah mempersiapkan draft wawancara secara jelas dan sesuai dengan objek yang akan diteliti. Adapun objek yang diteliti oleh penulis ialah sebagai berikut :

Peraturan Walikota Medan No 29 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) adalah sebuah program yang dibuat oleh pemerintah kota medan agar dapat mengatasi permasalahan tentang pengelolaan limbah rumah tangga yang berasal dari tangki septik masyarakat yang dilakukan oleh PDAM Tirtanadi yang ditunjuk sebagai pelaksana program L2T2 yang dilakukan secara terjadwal.

#### **4.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan, bahwa :

##### **4.2.1 Perbaikan Birokrasi Menuju yang Lebih Baik**

Reformasi birokrasi menunjukkan bahwa perbaikan birokrasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Reformasi ini mencakup penyederhanaan prosedur, penerapan e-government, serta pengurangan praktik korupsi dan nepotisme.

Sebagaimana menurut pendapat ibu ummi kholila yang menyatakan bahwa bentuk birokrasi yang dijalankan di PDAM Tirtanadi tentang program L2T2 yaitu:

*“Perbaikan birokrasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yaitu :*

*Membentuk struktur organisasi yang akan mendukung dan melaksanakan program L2T2. Dibutuhkan personil untuk pelaksanaan program L2T2 tersebut mulai dari rumah pelanggan sampai dengan pengolah di IPLT.*

*Penyusunan peraturan-peraturan yang mendukung program L2T2 ”*

Tidak hanya bicara tentang perbaikan birokrasi instansi pemerintahan juga harus melakukan perencanaan implementasi L2T2 dengan cara:

Menurut narasumber mba putri ayunda selaku pegawai bagian Hub-Lang:

*“Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda): Bappeda bertanggung jawab dalam penyusunan rencana bantuan pemerintah untuk pengembangan layanan lumpur tinja, termasuk perencanaan strategis dan penganggaran program L2T2. Dinas Pekerjaan Umum: Bertanggung jawab atas standarisasi teknis dan pengadaan prasarana, termasuk unit setempat,*

*stasiun penerima, dan fasilitas pengolahan lumpur tinja. Dinas Lingkungan Hidup: Bertanggung jawab atas pemeliharaan lahan tempat Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berada dan pemantauan dampak lingkungan, khususnya terkait kualitas efluen IPAL dan IPLT, kualitas lumpur olahan, serta timbulan bau dan dampak estetik lainnya”*

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan program L2T2 sesuai dengan yang dilakukan dilapangan, berdasarkan data dari *key informan* pak robbby :

*“Peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program L2T2 ini yaitu dengan Penyusunan Peraturan mengenai Program L2T2, membantu pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.”*

Implementasi program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) melibatkan berbagai instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab spesifik guna memastikan keberhasilan program tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan strategis dan penganggaran program L2T2 serta memastikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan daerah secara keseluruhan. Dinas Pekerjaan Umum berperan dalam penyediaan infrastruktur pendukung untuk pengelolaan lumpur tinja, termasuk pembangunan dan pemeliharaan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) serta fasilitas terkait lainnya. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam pengawasan dampak lingkungan dari pengelolaan lumpur tinja, termasuk

pemantauan kualitas efluen dari instalasi pengolahan lumpur tinja untuk memastikan tidak terjadi pencemaran lingkungan.

Reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur, penerapan e-government, serta pengurangan praktik korupsi dan nepotisme. Studi oleh Pollitt & Bouckaert (2017) menegaskan bahwa birokrasi yang efektif dapat mempercepat pengambilan keputusan serta memberikan pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks PDAM Tirtanadi, perbaikan birokrasi dalam pelaksanaan program L2T2 dilakukan dengan menyusun jadwal penyedotan lumpur tinja secara sistematis setiap tiga tahun berdasarkan data pendaftaran pelanggan agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Selain itu, PDAM Tirtanadi terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Medan, termasuk melakukan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk memastikan pengelolaan limbah yang efektif dan efisien.

Maka dari itu dapat disimpulkan PDAM Tirtanadi melakukan perbaikan birokrasi dalam pelaksanaan program L2T2 melalui penyusunan jadwal penyedotan lumpur tinja yang sistematis setiap tiga tahun berdasarkan data pendaftaran pelanggan agar pelaksanaannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, serta dengan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Medan, termasuk melakukan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan guna memastikan pengelolaan limbah yang efektif dan efisien.

Di sisi lain, keberhasilan program L2T2 tidak hanya bergantung pada perbaikan birokrasi, tetapi juga memerlukan perencanaan dan implementasi yang terstruktur dari berbagai instansi pemerintah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertanggung jawab dalam menyusun rencana bantuan pemerintah untuk pengembangan layanan lumpur tinja, termasuk perencanaan strategis dan penganggaran program. Dinas Pekerjaan Umum berperan dalam standarisasi teknis serta pengadaan prasarana, seperti unit setempat, stasiun penerima, dan fasilitas pengolahan lumpur tinja. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup bertugas dalam pemeliharaan lahan tempat Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berada serta pemantauan dampak lingkungan, khususnya terkait kualitas efluen IPAL dan IPLT, kualitas lumpur olahan, serta timbulan bau dan dampak estetik lainnya.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan implementasi program L2T2 berjalan sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini melibatkan koordinasi antarinstansi, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, serta penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat agar program dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Sehingga dapat disimpulkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertanggung jawab dalam penyusunan rencana bantuan pemerintah untuk pengembangan layanan lumpur tinja, termasuk perencanaan strategis dan penganggaran program L2T2. Dinas Pekerjaan Umum berperan dalam standarisasi teknis serta pengadaan prasarana, seperti unit setempat, stasiun penerima, dan fasilitas pengolahan lumpur tinja. Sementara itu, Dinas

Lingkungan Hidup bertugas dalam pemeliharaan lahan tempat Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berada serta pemantauan dampak lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan kualitas efluen IPAL dan IPLT, kualitas lumpur olahan, serta timbulan bau dan dampak estetik lainnya.

#### **4.2.2 Sistem Jaringan Kerja yang Jelas**

Penelitian oleh Provan & Kenis (2008) menunjukkan bahwa sistem jaringan kerja yang terstruktur dengan baik memungkinkan organisasi untuk bekerja lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama. Jaringan kerja ini mencakup kolaborasi antar lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam sektor kesehatan, sistem jaringan kerja yang jelas dapat mempercepat koordinasi antara rumah sakit, puskesmas, serta dinas kesehatan dalam menangani pasien dan mendistribusikan obat serta fasilitas medis. Hal ini juga berkaitan dengan penerapan sistem informasi kesehatan yang memungkinkan pertukaran data pasien secara lebih efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bukk ummi kholila, terdapat sistem kerja yang jelas dalam pelaksanaan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2).

Ibu Umi kholila mengatakan :

*“Dalam menjalankan program L2T2 harus memiliki sistem kerja yang jelas agar berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Masing-masing orang yang terlibat dalam pelaksanaan program L2T2 ini memiliki tugas masing-masing. Misalnya dalam melakukan penyedotan septik tank hingga pengolahan akhir lumpur*

*tinja. Masing-masing pihak terkait dalam menjalankan program L2T2 memiliki komunikasi yang intens yang memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah baik. Komunikasi antar pihak yang terkait dapat dilakukan dengan bersurat dan media telekomunikasi. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja antar unit terkait merupakan salah cara yang efektif dalam hal peningkatan pelayanan L2T2 kepada pelanggan khususnya dan masyarakat pada umumnya.”*

Seperti yang di katakan mba putri ayunda tentang bagaimana komunikasi serta koordinasi dari pihak terkait dalam menjalankan program l2t2 dan apakah koordinasi itu efektif :

*“Komunikasi yang efektif antara pihak-pihak terkait sangat penting dalam menjalankan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2). Berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait berperan dalam memastikan kelancaran program ini melalui koordinasi dan komunikasi yang baik. Contohnya: Sosialisasi Program: Lembaga operator, seperti PDAM Tirtanadi, bertanggung jawab memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan jadwal pelaksanaan L2T2. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat.”*

Selanjutnya berdasarkan pendapat dari pak robby mengenai koordinasi :

*“Dalam pelaksanaan L2T2 ini terdapat koordinasi antar unit terkait bukan hanya itu juga terdapat koordinasi yang dilakukan oleh antar instansi pemerintah agar dalam pelaksanaan program ini dapat*

*sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Selain itu koordinasi yang baik di internal instansi dapat menjalin silaturahmi yang baik antar pekerja yang menjalankan program l2t2. Bukan hanya itu pekerja akan ikut menjelaskan kepada masyarakat agar bisa menerima program L2T2.*

”

Program ini dirancang untuk melakukan penyedotan lumpur tinja dari tangki septik masyarakat secara berkala, biasanya setiap tiga tahun sekali, tergantung pada kondisi dan kesepakatan di masing-masing daerah. Sistem kerja yang diterapkan dalam program L2T2 melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu pendaftaran pelanggan, penetapan jadwal penyedotan, dan pelaksanaan penyedotan.

Pada tahap pendaftaran pelanggan, masyarakat mendaftarkan diri sebagai peserta program melalui lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, seperti PDAM atau unit pengelola air limbah setempat. Selanjutnya, lembaga pengelola menentukan jadwal penyedotan lumpur tinja secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang disusun berdasarkan data pelanggan dan kapasitas layanan yang tersedia. Pada tahap pelaksanaan, petugas melakukan penyedotan lumpur tinja dari tangki septik pelanggan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Proses ini dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan kualitas layanan serta menjaga keamanan lingkungan. Dengan sistem kerja yang terstruktur ini, program L2T2 diharapkan dapat

meningkatkan efektivitas pengelolaan air limbah domestik, menjaga kesehatan lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara pihak-pihak terkait sangat berperan dalam keberhasilan implementasi program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2). Berbagai instansi pemerintah dan lembaga pengelola sanitasi bekerja sama dalam memastikan program ini berjalan sesuai rencana. Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan adalah melalui sosialisasi program kepada masyarakat. Lembaga operator, seperti PDAM Tirtanadi, memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai tujuan, manfaat, serta jadwal pelaksanaan L2T2. Sosialisasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam program ini.

Koordinasi antar unit terkait dalam program L2T2 terbukti menjadi faktor kunci dalam keberhasilannya. Koordinasi yang baik memungkinkan penyusunan jadwal penyedotan lumpur tinja yang lebih efektif, memastikan kelancaran proses operasional, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan limbah domestik. Selain itu, koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, dan PDAM membantu dalam mengatasi kendala teknis serta memastikan program tetap berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dengan adanya sistem komunikasi dan koordinasi yang terstruktur, program L2T2 dapat memberikan manfaat

optimal bagi peningkatan sanitasi masyarakat serta pengurangan pencemaran lingkungan.

#### **4.2.3 Perwujudan Tujuan untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat**

Banyak penelitian menyoroti pentingnya kebijakan kesehatan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurut penelitian dari World Health Organization (WHO), keberhasilan suatu kebijakan kesehatan sangat bergantung pada perencanaan berbasis data, edukasi kesehatan, serta penguatan sistem layanan kesehatan primer.

Peningkatan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai inisiatif, seperti peningkatan cakupan imunisasi, program pencegahan penyakit menular, serta promosi gaya hidup sehat. Studi dari Marmot (2005) juga menekankan bahwa faktor sosial-ekonomi dan lingkungan memiliki peran besar dalam menentukan status kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang baik harus memperhitungkan faktor determinan sosial kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikatakan buk ummi adalah :

*“Program L2T2 adalah program penyedotan tangki septik secara berkala yang salah satu tujuan yang akan dicapai adalah mengurangi pencemaran lingkungan dan menjaga air tanah dari bakteri yang bersumber dari tinja yang telah meresap ke dalam tanah. Dengan terlaksananya program L2T2 ini tentu saja secara otomatis meningkatkan*

*derajat kesehatan masyarakat karena berkurangnya pencemaran lingkungan dan terjaganya sumber air tanah.”*

Menurut mba puti ayunda tentang program L2T2 apakah sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat :

*“Sudah, Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengelolaan limbah tinja yang lebih baik. Dengan penyedotan rutin tangki septik, program ini mencegah pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare dan cacingan. Selain itu, L2T2 meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah yang aman, yang berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat. Meskipun data spesifik mengenai peningkatan derajat kesehatan belum tersedia, implementasi program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Program (L2T2) dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan dan kebersihan ”*

Berdasarkan pendapat dari pak robbly mengenai hal ini adalah :

*“Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dirancang untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit di lingkungan masyarakat melalui pengelolaan limbah tinja yang lebih baik. Dengan penyedotan rutin tangki septik, program ini mencegah pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan penyakit menular. Selain itu, L2T2 meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab dalam mengelola air limbah yang*

*dihasilkan, yang berkontribusi pada pencegahan penyebaran penyakit. Meskipun data spesifik mengenai penurunan angka penyakit belum tersedia, implementasi program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Dengan terlaksananya program L2T2 ini diharapkan mengurangi dan mencegah resiko penyebaran penyakit di lingkungan masyarakat, terutama untuk penyakit kulit, disentri bahkan stunting. Program L2T2 yang bertujuan menjaga kebersihan lingkungan secara langsung berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Lingkungan yang bersih dan sehat juga berdampak langsung terhadap kualitas kesehatan masyarakat.”*

Pengaruh Program L2T2 dalam Mengurangi Risiko Penyebaran Penyakit Penelitian ini juga menemukan bahwa program L2T2 membantu mengurangi risiko penyebaran penyakit di lingkungan masyarakat melalui pengelolaan air limbah yang lebih efektif. Penyedotan rutin tangki septik mencegah pencemaran sumber air tanah serta lingkungan sekitar, yang merupakan faktor utama dalam penyebaran penyakit menular berbasis air. Selain itu, program ini juga mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan memahami pentingnya pengelolaan air limbah secara aman. Walaupun belum terdapat data spesifik mengenai penurunan angka penyakit akibat program ini, penerapan L2T2 diperkirakan mampu mengurangi risiko penyebaran penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk.

Dampak Program L2T2 terhadap Derajat Kesehatan Masyarakat hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memastikan pengelolaan limbah tinja yang lebih baik. Penyedotan rutin tangki septik mencegah pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare, cacingan, dan infeksi saluran pencernaan. Selain itu, program ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang aman, sehingga secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat. Meskipun belum tersedia data spesifik mengenai dampak langsung terhadap kesehatan, implementasi program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.

Kebijakan kesehatan berbasis bukti (evidence-based policy) berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Keberhasilan suatu kebijakan kesehatan sangat bergantung pada perencanaan berbasis data, edukasi kesehatan, serta penguatan sistem layanan kesehatan primer. Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan limbah yang lebih baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program L2T2 berkontribusi dalam mencegah pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan penyakit menular, seperti diare dan cacingan. Penyedotan rutin tangki septik tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan tetapi juga

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang aman. Selain itu, program ini berperan dalam mengurangi risiko penyebaran penyakit yang disebabkan oleh air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik.

Secara keseluruhan, L2T2 memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat dalam aspek kesehatan dan kebersihan. Lingkungan yang lebih bersih berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat serta mengurangi beban biaya kesehatan akibat penyakit yang ditimbulkan oleh sanitasi yang buruk. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai pengelolaan limbah, tetapi juga sebagai strategi preventif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

#### **4.2.4 Mandat Penyelesaian Kebijakan**

Mandat kebijakan merupakan instrumen penting dalam implementasi kebijakan publik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sabatier & Mazmanian (1980), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan mandat yang diberikan kepada lembaga pelaksana. Mandat ini mencakup regulasi, anggaran, serta kewenangan yang jelas dalam mengambil keputusan.

Dalam konteks kebijakan kesehatan, mandat yang jelas memungkinkan program kesehatan nasional, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dapat diimplementasikan dengan baik. Studi dari Pressman & Wildavsky (1973) menunjukkan bahwa kebijakan yang memiliki mandat kuat dan didukung oleh aktor-aktor yang kompeten memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi

dibandingkan dengan kebijakan yang implementasinya tidak terstruktur dengan baik.

Berdasarkan yang dikatakan buk ummi kholila :

*“Perumda Tirtanadi sebagai operator L2T2 yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi berusaha keras untuk menjalankan program L2T2 ini. Dimulai dari pengenalan apa itu L2T2 hingga implementasinya melalui pelaksanaan penyedotan lumpur tinja berkala secara rutin dan kemudian diolah di Pengolahan Lumpur Tinja yang juga dikelola oleh Perumda Tirtanadi. Pada dasarnya pelaksanaan program L2T2 tetap memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Terutama adanya penolakan dari masyarakat yang menganggap penyedotant tangki septik tidak perlu dan tidak bermasalah atau pun tidak pernah penuh. Perlu usaha untuk meyakinkan masyarakat betapa pentingnya program L2T2 untuk kebaikan masa depan bersama.*

*Dalam pelaksanaan Program L2T2 ini tantangan terbesarnya adalah masyarakat yang belum menerima sepenuhnya tujuan dari program ini. Adanya pengenaan tarif juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaannya. Perlu dikuatkan aturan mengenai keharusan menjaga kebersihan lingkungan dan juga kesadaran individual mengenai kebaikan dari program L2T2 ini.”*

Sedangkan menurut mba Purtri Ayunda selaku pegawai bagian Hub-Lang dalam hal mandat yang diberikan untuk menjalankan program kerja ini adalah:

*“Dalam menjalankan program (L2T2) amanah yang diberikan dapat berbentuk berbagai tanggung jawab yang harus dijalankan dengan*

*penyempurnaan integritas dan kepedulian. Contohnya : amanah dalam pengelolaan sumber daya, amanah dalam keberlanjutan program, amanah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, amanah dalam kejujuran dan akuntabilitas. pelaksanaan amanah dalam program L2T2 sudah sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan, diperlukan evaluasi dan pemantauan berkala.”*

Kesesuaian Pelaksanaan Mandat dengan Rencana dan Jadwal Pelaksanaan mandat dalam program L2T2 secara umum telah mengikuti rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Namun, untuk memastikan efektivitas program, diperlukan evaluasi dan pemantauan berkala guna menilai apakah seluruh tahapan pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku serta apakah terdapat aspek yang perlu diperbaiki atau disesuaikan.

Selanjutnya menurut pendapat dari bapak robby bahwa :

*“Dalam pengimplementasian program ini, ada beberapa hal yang menjadi hambatan yang paling utama dan sering menimbulkan kesalahan pemahaman adalah tentang mandat dalam melaksanakan penyedotan. dalam pelaksanaan amanah dalam program L2T2, terdapat beberapa hambatan atau tantangan yang dapat dihadapi, antara lain:*

- *kurangnya tenaga ahli atau pendamping*
- *partisipasi masyarakat yang kurang*
- *kurangnya koordinasi antara pihak terkait, seperti pemerintah, lsm, dan masyarakat, yang menyebabkan pelaksanaan tidak optimal.*

- *adanya tumpang tindih kebijakan atau regulasi yang memperlambat implementasi program.”*

Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Mandat Dalam implementasi program L2T2, terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan. Beberapa di antaranya meliputi:

- a. Kurangnya tenaga ahli atau pendamping yang berkompeten dalam pengelolaan dan pelaksanaan program, sehingga berdampak pada efektivitas layanan.
- b. Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah, yang dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya sanitasi dan pengelolaan limbah yang baik.
- c. Kurangnya koordinasi antara pihak terkait, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat, yang dapat menyebabkan ketidaksepahaman atau keterlambatan dalam implementasi program.
- d. Tumpang tindih kebijakan atau regulasi, yang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan di lapangan.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui peningkatan koordinasi, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan regulasi yang lebih terintegrasi, diharapkan program L2T2 dapat berjalan lebih optimal dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat.

Mandat kebijakan merupakan instrumen yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Berdasarkan penelitian Sabatier & Mazmanian (1980), kejelasan mandat yang diberikan kepada lembaga pelaksana berpengaruh besar terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Mandat ini mencakup regulasi, anggaran, serta kewenangan dalam pengambilan keputusan, yang harus dijalankan dengan akuntabilitas dan transparansi.

Dalam pelaksanaan Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2), terdapat berbagai bentuk mandat yang diberikan kepada pihak terkait untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mandat tersebut mencakup tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya, keberlanjutan program, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penerapan prinsip kejujuran dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan.

Dalam konteks kebijakan kesehatan dan sanitasi, mandat yang jelas memungkinkan program nasional, seperti Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2), dapat diimplementasikan secara efektif. Studi Pressman & Wildavsky (1973) menunjukkan bahwa kebijakan dengan mandat kuat dan didukung oleh aktor-aktor yang kompeten memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan dengan kebijakan yang implementasinya tidak terstruktur dengan baik.

Pelaksanaan program L2T2 mencakup berbagai bentuk mandat yang diberikan kepada pihak terkait, termasuk pengelolaan sumber daya, keberlanjutan program, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sanitasi yang lebih

baik. Evaluasi dan pemantauan berkala sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tetap sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan serta berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Meskipun demikian, dalam implementasi program ini terdapat sejumlah hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya, seperti kurangnya tenaga ahli, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, serta adanya tumpang tindih kebijakan atau regulasi yang memperlambat implementasi.

Dengan mengatasi berbagai hambatan tersebut melalui peningkatan koordinasi antarinstansi, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan regulasi yang lebih terintegrasi, diharapkan program L2T2 dapat berjalan lebih optimal dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Perbaikan Birokrasi Menuju Yang Lebih Baik**

Menurut (M. Irfan, 2021) implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuasn yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Implementasi kebijakan publik tidak lain dapat mencapai tujuan atau konsep implementasi yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, sehingga apabila pembuat kebijakan tidak salah dalam membuat kebijakannya.

Dalam Penelitian ini, diketahui bahwa tujuan yang telah dicapai dari implementasi peraturan walikota medan nomor 29 tahun 2019 tentang pengelolaan

layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2) oleh pdam tirtanadi kota medan sudah terlaksanakan. Akan tetapi masih ada beberapa perbaikan yang harus dibenahi terutama masalah komunikasi antar pemerintah kota medan dengan pdam tirtanadi selaku pelaksana program ini.

#### **4.3.2 Sistem Jaringan Kerja Yang Jelas**

Menurut (Henriyani, 2015) implementasi kebijakan publik merupakan proses menjalankan, meyelenggarakan dan mengupayakan keputusan kebijakan dan alternatifnya yang telah diputuskan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. Tujuan dari implementasi kebijakan publik sendiri adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat di realisasikan. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait sistem jaringsn kerja dalam melaksanakan program layanan lumpur tinja di kota medan ini sudah terjalin dengan baik dan sesuai dengan SOP yang ditentukan. Terutama tentang sosialisasi yang dilakukan pihak pdam tirtanadi kepada masyarakat terkait dampak positif yang dihasilkan dari program ini jika berhasil dilakukan dengan baik.

#### **4.3.3 Perwujudan Tujuan untuk Mewujudkan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat.**

Menurut (Sutmasa, 2021) implementasi kebijakan publik suatu tindak lanjut dari pembuatan kebijakan yang menjadi sekuen yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan, karena hanya implementasi maka tujuan dan hasil yang hendak diwujudkan (*output dan outcomes*) bisa terwujud.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa program layanan lumpur tinja terjadwal ini memiliki dampak yang positif terkait dalam meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat, dengan cara masyarakat harus memiliki tangki septick agar limbah tinja bisa desedot secara teratur. Langkah ini juga bisa mengurangi resiko pencemaran lingkungan. Akan tetapi masyarakat juga perlu menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab mereka juga agar terhidar dari penyakit menular.

#### **4.3.4 Mandat Penyelesaian Kebijakan.**

Menurut (Kristian, 2023) implementasi kebijakan publik adalah proses pengubahan masukan manusia dan material, termasuk informasi, teknis, manusia, permintaan dan dukungan menjadi keluaran berupa barang dan jasa. Dalam

implementasi kebijakan publik atau istilah eksekusi berbagai keputusan dan tindakan eksekutif yang berupaya mengubah mandat yang telah ditetapkan menjadi kenyataan.

Dari hasil penelitian perihal mandat yang diberikan dalam menjalankan program layanan lumpur tinja terjadwal ini, pemerintah dan pdam tirtanadi bekerja sama dengan pihak swasta dalam melakukan penyedotan. Akan tetapi yang terjadi dilapangan diluar dugaan, pasalnya terdapat beberapa kasus yang terjadi bahwa pihak swasta melakukan penyedotan septic tank dirumah warga. Tetapi ketika disurvei kembali oleh pihak tirtanadi terdapat masalah seperti alamat rumah yang berbeda, atau bahkan dokumentasi lokasi penyedotan rumah yang tidak sama. Juga ditemukan laporan bahwa rumah warga tersebut belum pernah disedot tetapi laporan dari pihak swasta sudah melakukan penyedotan. Ini menimbulkan kekeliruan antara masyarakat, pdam tirtanadi dan pihak swasta. Oleh sebab itu pdam tirtanadi melakukan survey ulang dan evaluasi terhadap pihak swasta agar menjalankan tugas lebih efektif lagi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, yang kemudian penulis melengkapkannya dengan penyajian data dari pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok dan permasalahan dan sekaligus memberikan saran yang bisa jadi berguna. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah

Terjalankannya program layanan lumpur tinja terjadwal (12t2) sesuai dengan peraturan walikota medan nomor 29 tahun 2019 sudah berjalan dengan efektif.

Hal ini dapat dilihat dari indikatornya yaitu:

1. Perbaikan birokrasi dari program layanan lumpur tinja terjadwal oleh PDAM Tirtanadi dengan cara yang lebih efisien yaitu mengatur penjadwalan penyedotan secara 3 tahun sekali.
2. Koordinasi yang dilakukan antar unit dan juga pemerintahan sudah berjalan dengan optimal karena antar unit dan pemerintahan sudah mengetahui dengan benar prosedur dalam menjalankan program layanan lumpur tinja terjadwal.
3. Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di sekitar kota medan juga sudah terlaksana dengan baik, namun perlu di tingkatkan lagi dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penyedotan limbah tinja secara terjadwal agar tidak mencemari lingkungan.
4. Mandat atau amanah yang diberikan untuk menjalankan program layanan lumpur tinja terjadwal juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik,

5. sehingga perlu dilakukan evaluasi kepada pihak ke tiga yang di tunjuk perusahaan dalam menjalankan program agar bisa lebih efektif dan efisien dalam menjalankan mandat.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas dan uraian yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan dalam meningkatkan Implementasi Peraturan Walikota Medan No 29 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) di PDAM Tirtanadi Kota Medan adalah,

sebagai berikut :

1. PDAM Tirtanadi harus meningkatkan dan lebih teratur dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) di Kota Medan agar upaya mencapai tujuan yang diinginkan berjalan dengan semestinya.
2. PDAM Tirtanadi juga harus meningkatkan pemantauan dan pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa layanan berjalan sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan.
3. PDAM Tirtanadi dan pemerintah Kota Medan dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau perusahaan penyedia layanan pengelola limbah untuk dapat memperkuat dalam pengimplementasian program ini

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al, S., Nainggolan, A., Amrizal, D., Studi, P., Administrasi, I., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2016 Dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Di Desa Sukamaju. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 2(1). <https://doi.org/10.30596/japk.v2i1.10326>
- Astuti, N., & Zubaedah, I. (2023). Kebijakan Publik Pemerintahan Joko Widodo Dan Ma'RufAmin Melalui Bantuan Tunai Langsung (Blt) DalamMenanggulangi Masalah Kemiskinan Di IndonesiaPeriode Ke-2 Tahun 2019 – 2024. *Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(2), 158–171.
- Damanik, K., Sinaga, M., Sihombing, S., Hidajat, M., & Prakoso, O. S. (2024). Pengaruh Kualitas Layanan, Kebijakan Publik dan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 76–85. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i2.1834>
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- Henriyani, E. (2015). Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik. In *MODERAT : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* (Vol. 1, Issue 4, pp. 657–666).
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Lubis, A. K., & Mahardika, A. (2024). Efektivitas Pelayanan Prima Pada Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal ( L2T2 ) di Kantor Cabang Pemasaran Air Limbah PDAM Tirtanadi Kota Medan The Effectiveness of Excellent Service in The Scheduled Fecal Sludge Service Program ( SFSS ) at The Waste Wat. 3(1), 25–36.
- M. Irfan. (2021). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kota

- Bima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 22–41.  
<https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.141>
- Mamoto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Mendrofa, R., Pembinaan, U., Indonesia, M., Publik, K., & Administrasi, T. (2024). Implementasi Kebijakan Publik serta Terhadap Kepentingan Publik Berdasarkan Teori Administrasi Negara Saat Ini. *Journal Genta Mulia*, 15(1), 387–392.
- No Analisis struktur kovarians indikator terkait kesehatan pada lansia yang tinggal di rumah, dengan fokus pada rasa subjektif terhadap kesehatan Title. (2021). *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Nur, A. M., Nurhidayati, N., & Fathurrahman, I. (2024). Penerapan Metode Naïve Bayes Untuk Penentuan Penerima Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP). *Infotek: Jurnal Informatika Dan Teknologi*, 7(1), 93–102.  
<https://doi.org/10.29408/jit.v7i1.23995>
- Nurhayati, N., Primarni, A., & Tholkhah, I. (2023). Implementasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pembelajaran di SD Yapis Kota Bogor. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(1), 70–81. <https://doi.org/10.47467/jdi.v6i1.4961>
- Pasien, P., & Studi, H. (2024). 3 1,2,3. 4, 2020–2025.
- Rizky, R. N., & Mahardika, A. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Umum Kota Medan. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275–1289.  
<https://doi.org/10.55681/Sentri.V2i4.745>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik.

*Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>

Van Horn, C. E., & Van Meter, D. S. (1977). The implementation of intergovernmental policy. *Policy studies review annual*, 1(1), 97-120.

## DOKUMENTASI



Foto bersama pegawai PDAM Tirtanadi Kota Medan Cabang Pemasaran Air Limbah.



Foto Wawancara dengan Pegawai PDAM Titanadi Kota medan.





Foto melakukan survey dan penyedotan  
Limbah Tinja



Foto kantor dan truk penyedot limbah tinja

*Acc*  
*Draft Wawancara*  
*18/2-25*

## PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk pihak perusahaan :

### A. Identitas K.Informan

Nama :  
Tempat/Tanggal lahir :  
Alamat :  
No.Hp :  
Jabatan :

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama melakukan pengkajian data secara mendalam. Berikut ini adalah draft wawancara yang telah disusun.

#### a. Perbaikan birokrasi menuju yang lebih baik.

1. Bagaimana bentuk perbaikan birokrasi yang dilakukan oleh PDAM Tirtanadi dalam menjalankan program L2T2 ?
2. Bagaimana peran masing-masing instansi pemerintah dalam perencanaan implementasi L2T2 ?
3. Bagaimana tanggung jawab masing-masing instansi pemerintah dalam menjalankan program L2T2 ?

#### b. Sistem jaringan kerja yang jelas.

1. Apakah ada sistem kerja yang jelas dalam menjalankan program L2T2 ?
2. Bagaimana komunikasi antara pihak-pihak terkait dalam menjalankan program L2T2 ?
3. Apakah ada koordinasi yang efektif antar unit-uniti terkait ?

**c. Perwujudan tujuan untuk meningkatnya kesehatan masyarakat.**

1. Apakah program L2T2 ini sudah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ?
2. Apakah program L2T2 ini sudah mengurangi resiko penyebaran penyakit dilingkungan masyarakat ?
3. Apakah program L2T2 dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dalam hal kesehatan dan kebersihan ?

**d. Mandat yang diberikan untuk menyelesaikan suatu kebijakan.**

1. Bagaimana bentuk mandat (amanah) yang diberikan dalam menjalankan program L2T2 ?
2. Apakah pelaksanaan mandat (amanah) tersebut sudah sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan ?
3. Apakah ada hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan mandat (amanah) tersebut ?



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jalan M. Yamin No. 100 Medan 20135 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
Email: info@umsu.ac.id | website@umsu.ac.id | @umsu | @umsu | @umsu

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SIK/AN-PT/IAK-K/PIPT/17/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
@umsu | info@umsu.ac.id | website@umsu.ac.id | @umsu | @umsu | @umsu

Sk-I

**PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 12 November 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : SRI KARTIKA JARI LUBIS  
NPM : 21.031.000.55  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
SKS diperoleh : 124 SKS, IP Kumulatif 3,73

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi:

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Layanan Lunjuri Tinja Terjadwal (L2T2) Di PDAM TIRANADI Kota MEDAN.	Acc 12/11/2024
2	Implementasi PERDASU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan limbah perpipaan dan ION Perpipaan Untuk Kesehatan lingkungan hidup di Kota MEDAN.	
3	Implementasi PERDA Kota MEDAN no 37 tahun 2002 tentang IZIN usaha pariwisata di Kota MEDAN.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan:

- Tanda bukti bebas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 12 November 2024

Ketua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Mahardika, S.Pd, M.Pd)  
NIDN:

Pemohon,

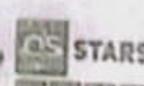
(SRI KARTIKA JARI LUBIS)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

NIDN: 0110097201

OSC

Pd. DEDDI AMRIZAL M.Si





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fisp.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**  
**TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**Nomor : 2044/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H / 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: 12 November 2024, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **SRI KARTIKA SARI LUBIS**  
N P M : 2103100055  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025  
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (L2T2) DI PDAM TIRTANADI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 036.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 12 November 2025.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 12 Djumadil Awwal 1446 H  
14 November 2024 M

Dekan,  
  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0030017402



**Tembusan:**

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. *Peringatan.*





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Dua Misi Utama yang Berdaya Guna  
Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KPI/PTX/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
🌐 <https://fisp.umsu.ac.id> ✉ [fisp@umsu.ac.id](mailto:fisp@umsu.ac.id) 📍 [umsumedan](#) 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, Senin, 06 Januari 2024.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SRI KARTIKA SARI LUBIS  
NPM : 2103100077  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 034-24/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024, tanggal 14 November dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2019  
TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL  
(L2T2) DI PDAM TIRTANADI KOTA MEDAN.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;
4. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir,
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Mengetahui :

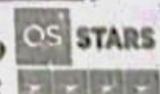
Pembimbing

(Dr. DDDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.)

NIDN: 0110097201

Pemohon,

(SRI KARTIKA SARI LUBIS)





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fslp.umsu.ac.id> [fslp@umsu.ac.id](mailto:fslp@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 481/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Lampiran : --

Hal : *Mohon Diberikan izin  
 Penelitian Mahasiswa*

Medan, 19 Sya'ban 1446 H

18 Februari 2025 M

Kepada Yth : **Pt. Direktur Utama PDAM Tirtanadi Kota Medan**

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
 Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Kantor PDAM Tirtanadi Kota Medan, atas nama :

Nama mahasiswa	: <b>SRI KARTIKA SARI LUBIS</b>
N P M	: 2103100055
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: <b>IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (L2T2) DI PDAM TIRTANADI KOTA MEDAN</b>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Cc : File.



**Dr. ARIEF SALEH, S.Sos., MSP.**  
 NIDN. 0030017402





## SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET-334/SDM/02/2025

Kepala Divisi Sumber Daya Manusia menerangkan bahwa Mahasiswa/i Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Sri Kartika Sari Lubis	2103100055	Ilmu Administrasi Publik

Benar telah melaksanakan Magang di Cabang Pemasaran Air Limbah Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 - 27 Maret 2025.

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan Mahasiswa/i dalam menyelesaikan tugas akhir.

Medan, 28 April 2025

a.n Direktur Administrasi Keuangan

Kepala Divisi Sumber Daya Manusia







**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KPI/PT/KI/2022  
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
Website: [filsip.umsu.ac.id](http://filsip.umsu.ac.id) Email: [filsip@umsu.ac.id](mailto:filsip@umsu.ac.id) Instagram: @umsuimedan Facebook: umsumedan Twitter: umsumedan

Sk-5

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SRI KARTIKA SARI WBCN P M : 2103100011Program Studi : Ilmu Administrasi PublikJudul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 29 tahun 2019 tentang Pengebuan layanan lumpur tinja terjadwal (L2T) di PDAM Tihoneli Kaki Medan.

No.	Tanggal	Kegiatan / Aktivitas / Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	5/12 2024	Bimbingan proposal skripsi	
2.	6/12 2024	Basis latar belakang masalah, kerangka konsep, kategorisasi penelitian	
3.	9/12 2024	ACC Seminar proposal	
4.	14/02 2025	Bimbingan draft wawancara	
5.	17/02 2025	Basis draft wawancara	
6.	18/02 2025	ACC draft wawancara	
7.	15/04 2025	Bimbingan Bab IV dan Bab V	
8.	17/04 2025	Revisi Bab IV dan Bab V	
9.	19/04 2025	ACC Sidang Meja Hijau	

Medan, 19 April 2025



Dekan,  
(Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.)  
NIDN: 003007402

Ketua Program Studi,  
(Alvinda Mahandika, S.Sos.,MSP)  
NIDN: 012110001

Pembimbing,  
(Dr. Anwar MSA)  
NIDN: 011000001





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

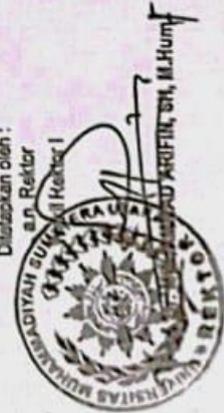
UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR  
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)  
Nomor : 725/UND/IL.SAJ/UMSU-03/F/2025

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	AISYAH ANINDYA PUTRI	2103100014	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI PASAR PAJAK LAMA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
12	NUR USWATUN HASANAH	2103100031	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PENGATURAN LALU LINTAS TANPA IZIN DI KOTA MEDAN
13	PERTWI	2103100011	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS FUNGSI MSDM DALAM PENGELOLAAN TPA TERJUN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN
14	SALSABILA ANDRY ZARKASI	2103100045	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS APLIKASI MY TIRTANADI SEBAGAI SARANA OPTIMALISASI PELAYANAN BERBASIS DIGITAL DI PDAM TIRTANADI KOTA MEDAN
15	SRI KARTIKA SARI LUBIS	2103100055	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (L2T2) DI PDAM TIRTANADI KOTA MEDAN

Medan, 22 Syawal 1446 H  
21 April 2025 M

Ditandatangani oleh:  
a.n. Rektor



Ketua  
Assoc. Prof. Dr. AFRIN SALEH, MSP.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Surat Keterangan ini, agar diterbitkan  
harus ditandatangani oleh Kepala Perpustakaan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567  
NPP. 1271202D1000003 ☎ <http://perpustakaan.umsu.ac.id> ✉ [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id) 📧 [perpustakaan\\_umsu](mailto:perpustakaan_umsu)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 01251/KET/IL.4-AU/UMSU-P/M/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : sri kartika sari lubis  
**NPM** : 2103100055  
**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
**Jurusan/ P.Studi** : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 20 Syawal 1446 H

19 April 2025 M

Kepala Perpustakaan,  
  
Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

PK

Administrasi Publik dan Kebijakan

JAPK

(JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN)

ISSN 2807-6729

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

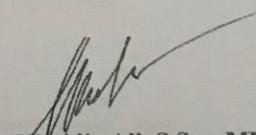
Dear Ms. Sri Kartika Sari Lubis

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK). accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "*Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) di PDAM Tirtanadi Medan*" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 1 Juny (2025). We hope that publication will benefit us all.

Thank you for your attention.

Meuan, April 14, 2025

Editor In Chief

  
(Khaidir Ali, S.Sos., MPA)  
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>  
Contact: 082160559891

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****IDENTITAS DIRI**

Nama : Sri Kartika Sari Lubis  
Npm : 2103110055  
Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Lima, 14 April 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak ke : 3 dari 3 bersaudara  
Alamat : Emplasmen PTPN IV Bukit Lima, Kabupaten  
Simalungun Sumatera Utara  
No. Hp : 081260266520

**ORANG TUA**

Ayah : Samsul Bahri Lubis  
Pekerjaan : Pensiunan BUMN  
Ibu : Suryani  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Emplasmen Bukit Lima

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD : SD Negeri 091697 Bukit Lima  
SMP : SMP Swasta PTPN IV Bukit Lima  
SMA : SMK Taruna Tekno Nusantara Medan  
Kuliah : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi  
Publik